

VOLUME 48, NO.1, MEI 2024

Penyimpanan Arsip Digital di Divisi Tema C2 Berjalan *Office* Yogyakarta

Monica Valencia Joseph Sugiyanto & Dwiatmodjo Budi Setyarto

Pengalaman Pengembangan Kepemimpinan Mahasiswa Program Studi Administrasi Perkantoran ASM Marsudirini Santa Maria Yogyakarta selama Mengikuti Praktik Kerja Lapangan Periode Januari – Februari 2024

Ignasius Triyana

Optimalisasi Pengelolaan Kearsipan Desa

Mateus Susanto

Mengelola Modal Kerja dalam Perusahaan Manufaktur

Gregorius Jarot Windarto

Opini Publik dalam Perspektif Public Relations dan Komunikasi Pemasaran

Yulius Pribadi

**Benturan Budaya Warisan Leluhur Versus Budaya Milenial
Konflik Pendidikan Menjadi Beban Para Pendidik**

Fx. Indrojiono

Redefinisi *Public Relations* pada Era Digital

Ch. Kurnia Dyah Marhaeni

Pembayaran Pajak Daerah Secara Non Tunai Melalui *Qris Dinamis* di Kota Yogyakarta

Petrus Sutono

JURNAL ILMIAH SOSIAL

Caritas pro Serviam

ASM MARSUDIRINI SANTA MARIA
YOGYAKARTA

Volume 48, No.1, Mei 2024
ISSN : 1410 4547

<http://asmistmaria.ac.id/wp/jurnal-charitas-pro-serviam>

Jurnal Ilmiah Sosial Caritas Pro Serviam diterbitkan enam bulan sekali sebagai media publikasi hasil penelitian dan hasil pemikiran para dosen ASM Marsudirini Santa Maria Yogyakarta. Redaksi juga mengundang para penulis, dosen, guru, praktisi dan profesional lain untuk mengisi tulisan di jurnal ini sebagai wacana pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebijakan dan implementasi kebijakan, praktik dan seni

DEWAN REDAKSI

Penanggung jawab

Sr. M. Paula Surwani OSF, S.Ag., M.Sos.
Direktur ASM Marsudirini Santa Maria Yogyakarta

Penyunting Ahli

Prof. Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Penyunting Bahasa

- Dr. Kristina Wasiyati, S.Pd., M.Hum
- Yohanes Maryono, S.S., M.Hum., M.T.

Penyunting Pelaksana

- Lukas Dwiantara, SIP., M.Si.
- Ch. Kurnia Dyah M, S.Sos., M.M.
- Indri Erkaningrum F., SE., M.Si.
- Dwiatmodjo Budi Setyarto, S.Sos., M.P.A
- Ignasius Triyana, SIP., M.M.

Produksi

Bagas Dewa Prayudhi, A.Md.

Administrasi dan Sirkulasi

Agustinus Iryanto Bawa Prasetya, S.Kom.

DAFTAR ISI

Dewan Redaksi Daftar Isi

Penyimpanan Arsip Digital di Divisi Tema C2 Berjalan <i>Office</i> Yogyakarta ...	1
Monica Valencia Joseph Sugiyanto & Dwiatmodjo Budi Setyarto	
Pengalaman Pengembangan Kepemimpinan Mahasiswa Program Studi Administrasi Perkantoran ASM Marsudirini Santa Maria Yogyakarta Selama Mengikuti Praktik Kerja Lapangan Periode Januari – Februari 2024	15
Ignasius Triyana	
Optimalisasi Pengelolaan Kearsipan Desa	28
Mateus Susanto	
Mengelola Modal Kerja dalam Perusahaan Manufaktur	38
Gregorius Jarot Windarto	
Opini Publik dalam Perspektif Public Relations dan Komunikasi Pemasaran ..	47
Yulius Pribadi	
Benturan Budaya Warisan Leluhur Versus Budaya Milenial Konflik Pendidikan Menjadi Beban Para Pendidik	58
FX. Indrojiono	
Redefinisi <i>Public Relations</i> pada Era Digital	71
Ch. Kurnia Dyah Marhaeni	
Pembayaran Pajak Daerah Secara Non Tunai Melalui <i>Qris Dinamis</i> di Kota Yogyakarta	83
Petrus Sutono	

PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA NON TUNAI MELALUI QRIS DINAMIS DI KOTA YOGYAKARTA

Petrus Sutono

Abstract

Regional taxes as one of the tools to collect funds from the community to the regional government are still the mainstays of the original regional revenue sources. Regional tax collection has been conducting for quite a long time started from the use of conventional methods so that the transparency of its implementation has not been maximized. Various innovations continue to be made to optimize regional tax revenues. Along with the development of information technology, regional government implements payment method that can meet procedures, save time, reduce costs, and ensure transparency. The method is dynamic Qris, an innovation method of paying non-cash taxes online.

Keywords: *regional taxes, original regional revenue, conventional methods, transparency, dynamic Qris*

A. Pendahuluan

Pajak daerah adalah pungutan uang oleh pemerintah daerah dengan maksud meningkatkan pendapatan asli daerah yang dipergunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Pajak daerah mencakup pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Cara pemungutan Pajak daerah ini telah berjalan cukup lama dengan cara yang masih konvensional sehingga pendapatan yang diharapkan belum bisa memenuhi target yang telah ditentukan.

Kemajuan teknologi informasi yang cukup pesat telah merambah ke tatanan pemerintahan baik pusat maupun daerah, tak terkecuali kota Yogyakarta yang menerapkan aplikasi Jogja Smart Service (JSS) yang lengkap dengan berbagai layanan dan informasi. Fasilitas layanan pembayaran juga ditingkatkan dengan

menggunakan aplikasi yang memungkinkan pembayaran dilakukan secara non tunai sehingga mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

Aplikasi Qris Dinamis sebagai salah satu metode pembayaran pajak secara non tunai diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah serta mengurangi resiko penyalahgunaan pajak.

B. Pembahasan

Salah satu tugas negara dalam bidang pelayanan masyarakat berkaitan dengan kebutuhan dan tuntutan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tugas pelayanan pemerintahan tersebut dalam pelaksanaannya senantiasa ditingkatkan mengikuti perkembangan jaman. Sedangkan pelayanan yang baik menjadi tuntutan masyarakat, pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan seseorang, semakin majunya

peradapan masyarakat maka semakin kompleks tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Pelayanan publik dimaksudkan sebagai pemberian layanan keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bersifat nonkomersial. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat umum maupun swasta, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan; masyarakat sebagai warga negara berhak memperoleh pelayanan yang prima, pemerintah sebagai penyedia layanan, kepuasan pelanggan. Tiga hal tersebut merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam pelayanan publik. Pelayanan prima merupakan tuntutan masyarakat kepada penyelenggara layanan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dengan faktor faktor seperti keramahan, kredibilitas, akses, penampilan fasilitas, dan kemampuan dalam menyajikan pelayanan. Dalam mewujudkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat, dibutuhkan standar pelayanan secara cepat, tepat tanggap dengan biaya murah, sehingga terciptalah suatu pelayanan prima, tentunya pelayanan harus

memperhitungkan efisiensi dan efektifitas, dalam kerangka etika pelayanan publik.

Tingkat efektifitas pelayanan publik yang dilakukan oleh aparaturnya pemerintah, dapat dilihat dari tingkat keberhasilan pelayanan yang telah diberikan pada publik, yang tentunya harus sesuai dengan tujuan dan sasaran pelayanan publik itu sendiri. Adanya keluhan masyarakat yang berkaitan dengan perilaku para birokrat, merupakan salah satu indikator kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Dalam era otonomi yang nyata dan tanggung jawab, pemerintah dituntut untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam urusan pelayanan pemerintah telah membuat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Standar Pelayanan Minimal, peraturan ini sebagai payung hukum yang berkenaan dengan pelayanan publik, yang yang tentunya disesuaikan situasi dan kondisi masyarakat daerah masing-masing.

Pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk menggunakan terobosan-terobosan baru, ide kreatif yang bersifat original atau bisa juga adaptasi atau modifikasi beberapa metode pelayanan dan melihat dimensi kualitas pelayanan publik (kecepatan, ketepatan, kemudahan, dan keadilan, serta berpedoman dengan prinsip pelayanan publik, sehingga inovasi teknologi dalam hal pelayanan sangat diharapkan masyarakat mendapat kepuasan pelayanan. Tujuan dikeluarkannya Instruksi Presiden

No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional adalah pengembangan e-government dalam rangka mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik guna meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Pemerintah kota Yogyakarta meluncurkan aplikasi Jogja Smart Service (JSS) untuk mendukung peningkatan pelayanan publik tersebut. Salah satu menu dalam program aplikasi tersebut adalah Qrisna sebagai bentuk layanan pembayaran pajak daerah berbasis Qris dinamis yang terintegrasi dengan data tagihan pajak daerah. Pemanfaatan Qris untuk pembayaran pajak daerah diharapkan mampu mewujudkan elektronisasi transaksi pembayaran pajak daerah secara non tunai dan akan meningkatkan realisasi penerimaan dan transaksi digital. Dengan adanya transformasi layanan berbasis digital ini, selain untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi penerimaan pajak daerah, juga sebagai upaya mempercepat implementasi digitalisasi transaksi keuangan daerah di kota Yogyakarta.

Program aplikasi Qris ini diluncurkan oleh pemerintah kota Yogyakarta, telah memenuhi inovasi dalam bidang pelayanan publik meliputi :

1. Inovasi Layanan

Inovasi pelayanan yang diberlakukan kepada masyarakat sebagai wajib pajak sudah tidak perlu lagi mengunjungi secara fisik tempat pembayaran pajak karena transaksi dapat dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Qris yang dapat diunduh dan diinstal dalam Smartphone berbasis

Android yang di desain dengan memanfaatkan Quick Response (QR) Code. Masyarakat cukup login ke aplikasi tersebut untuk melakukan pembayaran Pajak daerah sesuai kewajiban yang telah ditagihkan berdasarkan data yang telah diterbitkan oleh instansi terkait. Pembayaran wajib Pajak daerah oleh masyarakat sudah menggunakan metode digital yang fungsinya sama seperti pembayaran dengan uang tunai.

2. Inovasi Proses Pelayanan

a. Perubahan Organisasi.

Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Instruksi Walikota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai, telah turut serta dalam melakukan pengembangan *e-government* di Indonesia yaitu melalui pemanfaatan kemajuan teknologi dan informasi dalam meningkatkan pelayanan salah satunya pembayaran Pajak daerah secara elektronik dengan menggunakan Qris. Model pelayanan pembayaran Pajak daerah tersebut telah membawa perubahan pada organisasi pemerintahan dimana pemanfaatan teknologi mesin akan mengurangi tenaga manusia khususnya dalam melayani penerimaan pembayaran.

b. Prosedur.

Dalam melaksanakan peraturan pembayaran pajak daerah tentunya berlandaskan pada payung hukum khususnya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya sebelum dilaksanakan. Pemerintah kota Yogyakarta membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) guna menjaga dan mengawal inovasi digitalisasi

transaksi keuangan pemerintah daerah.

Peningkatan kualitas pelayanan menjadi tekad pemerintah kota Yogyakarta yang senantiasa ditingkatkan dari mulai pelayanan konvensional meningkat menjadi pelayanan digital. Sebelumnya pembayaran pajak daerah dilakukan dengan menggunakan uang tunai ke tempat yang telah ditunjuk oleh instansi terkait, dirubah dengan membayar sendiri melalui Qris yang terdapat dalam aplikasi JSS.

c. Perubahan yang dirasakan dengan penerapan pembayaran pajak daerah secara non tunai menggunakan Qris dinamis adalah pembayaran Pajak daerah secara manual yang tidak efisien dirubah menjadi elektronik sehingga menjadi efisien. Masyarakat cukup menggunakan smartphone yang telah terinstal aplikasi JSS kemudian memilih jenis pajak yang akan dibayarkan serta scan QR Code Qris untuk melakukan pembayarannya.

3. Peningkatan Pendapatan Daerah

Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan memerlukan dana yang bersumber dari pusat dan dari daerah. Sumber dari pusat berasal dari APBN yang dialokasikan ke tiap daerah. Sedangkan pemerintah daerah diberi wewenang (otonomi) untuk menggali sumber yang berasal dari daerahnya masing-masing yang dikenal dengan pendapatan daerah. Pendapatan ini merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). Pendapatan

daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan)

Kota Yogyakarta dengan luas wilayah yang tidak terlalu besar dan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang terbatas, sehingga strategi yang diambil oleh pemerintah kota Yogyakarta adalah dengan intensifikasi Pajak daerah dengan menerapkan pembayaran pajak non tunai melalui aplikasi JSS. Aplikasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah PAD dari bidang Pajak daerah dengan meminimalisir kebocoran atau penyalahgunaan pungutan. Perubahan dari cara konvensional ke elektronik memakai metode pelayanan terintegrasi dengan Bank, artinya proses pembayaran dilakukan dengan langsung mengambil data sesuai besarnya tagihan masing-masing.

4. Proses Layanan Pembayaran Non Tunai melalui Qris Dinamis

a. Mengunduh aplikasi JSS (*Jogja Smart Service*)

Aplikasi JSS merupakan layanan yang digagas oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian kota Yogyakarta dengan basis single id atau single sign on. Aplikasi ini memiliki prinsip mengumpulkan semua aplikasi ke dalam satu wadah dengan menggunakan satu credential dan hanya memerlukan satu kali login untuk dapat masuk ke semua aplikasi sesuai kewenangan masing-masing pengguna sehingga memudahkan pengguna untuk mendapatkan

layanan digital. Aplikasi Jogja Smart Service dikembangkan dalam dua platform yakni berbasis web untuk transaksi yang rumit dan aplikasi mobile untuk akses yang praktis.

b. Pilih Aplikasi Qrisna

Setelah berhasil menginstal aplikasi JSS, kemudian login dengan menggunakan akun yang telah didaftarkan terlebih dahulu yang berupa alamat email dan password. Selanjutnya memilih Aplikasi Qrisna yang terdapat dalam kategori Pajak dan Retribusi.

c. Pilih Jenis Tagihan Pajak/Retribusi

Dalam aplikasi Qrisna terdapat berbagai pilihan jenis pajak daerah yang bisa dibayarkan, kita tinggal memilih jenis pajak mana yang sesuai dengan kewajiban kita sebagai wajib pajak dan mana yang akan kita bayarkan.

d. Masukkan Nomor Tagihan Anda

Setelah memilih jenis pajak yang akan kita bayarkan, kemudian kita diminta memasukkan nomor tagihan pajak yang sesuai dengan beban kita, secara otomatis akan muncul besarnya nominal tagihan pajak dan nama wajib pajak yang bersangkutan.

e. Pilih Tagihan kemudian Bayar Sekarang

Selanjutnya kita pilih tagihan dilanjutkan dengan memilih menu bayar sekarang, kemudian sistem akan mengolah dan menampilkan QR Code Qris.

f. Mengunduh/ Scan QR Code Qris untuk membayar tagihan

Pembayaran tagihan pajak daerah dapat dilaksanakan setelah kita mengunduh QR Code Qris tersebut.

g. Scan Qris menggunakan aplikasi pembayaran

Sistem pembayaran pajak non

tunai telah disediakan oleh berbagai instansi pembayaran baik bank maupun non bank melalui berbagai produk layanan pembayaran. Layanan digital tersebut mensyaratkan pengguna memiliki cadangan dana yang mencukupi untuk melunasi pembayaran.

h. Daftar riwayat transaksi Anda

Salah satu manfaat yang bisa dirasakan adalah adanya historis riwayat pembayaran yang pernah dilakukan oleh wajib pajak. Ada kalanya kita sangat membutuhkan riwayat pembayaran pajak guna kepentingan tertentu.

i. Terlampir hasil bukti pembayaran

Sebagai bukti pembayaran yang telah dilakukan, tentu ada dokumen otentik. Aplikasi pembayaran non tunai melalui Qris dinamis ini menyediakan bukti digital yang bisa diunduh dan dicetak jika kita menghendaki bukti fisik.

C. Kesimpulan

Intensifikasi yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah yakni melalui peluncuran aplikasi Qris Dinamis yang disematkan dalam aplikasi Jogja Smart Service (JSS). Aplikasi ini mampu meningkatkan pelayanan publik khususnya pelayanan pembayaran non tunai yang dilakukan secara online. Kecepatan pelayanan dan transparansi pembayaran pajak daerah ini sangat dirasakan oleh masyarakat sebagai wajib pajak karena langsung dapat dilakukan pelunasan sesuai dengan besarnya pajak yang menjadi kewajibannya.

Penerapan pembayaran pajak non tunai ini menjadi salah satu program

percepatan dan perluasan digitalisasi daerah yang diharapkan menjadi pendukung dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

<https://jogjaprovo.go.id/berita/tp2dd-sinergi-rumuskan-program-terbaik>

DAFTAR PUSTAKA

Ferta Ayu Aditama, Nila Firdausi Nuzula, Sarwono, *Intensifikasi Pemungutan Pajak* Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. Malang. 2009

Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasi*. Gava Media. Yogyakarta. 2011.

Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*. Cetakan Pertama. Penerbit FH UII Press. Yogyakarta. 2008

Mardiasmo. *Perpajakan* (Edisi Revisi 2013). Penerbit Andi. Yogyakarta 2013.

Pedoman Umum Pajak Daerah dan Pajak daerah Daerah, Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI. 2019.

PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

[https://djpk.kemenkeu.go.id/Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia](https://djpk.kemenkeu.go.id/Direktorat%20Jenderal%20Perimbangan%20Keuangan%20Kementerian%20Keuangan%20Republik%20Indonesia).

<https://bpkad.jogjakota.go.id/detail/index/32181>

<https://penerimaantamu.jogjakota.go.id/inovasi/main/detail/20>

<https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/33068>

BIODATA PENULIS

1. **Monica Valencia Joseph Sugiyanto**, lahir di Tangerang tanggal 12 Juni 2002 menyelesaikan pendidikan Prodi D3 Administrasi Perkantoran ASM Marsudirini Santa Maria Yogyakarta pada Tahun 2023.
2. **Dwiatmodjo Budi Setyarto**, lahir di Jakarta tanggal 22 Januari 1974. Tahun 1997 menyelesaikan pendidikan jurusan S1 Ilmu Administrasi, Prodi S1 Administarsi Negara, Universitas Diponegoro Semarang. Tahun 2012 menyelesaikan S2 Manajemen dan Kebijakan Publik/Master of Public Administration di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tahun 2006 mulai mengajar di ASM Marsudirini Santa Maria Yogyakarta sebagai dosen DPK LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta. Matakuliah yang diampu: Tata Persuratan Dinas, Manajemen Arsip Inaktif dan Statis, MSDM, dan Metodologi Penelitian.
3. **Ignasius Triyana**, S.I.P., M.M., lahir di Sleman, 5 September 1967. Tahun 1994 menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tahun 2000 menyelesaikan pendidikan S2 Magister Manajemen Universitas Indonusa Esa Unggul Jakarta. Tahun 1994 sampai sekarang menjadi dosen tetap Program Studi Administrasi Perkantoran ASM Marsudirini Santa Maria Yogyakarta. Mata kuliah yang diampu: Manajemen Kantor, Kepemimpinan, dan Manajemen Keuangan & Perbankan.
4. **Mateus Susanto**, lahir di Yogyakarta 21 September 1966. Tahun 1991 menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Administrasi Negara Fisipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tahun 2000 menyelesaikan pendidikan S2 Program Studi Ketahanan Nasional Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Mata kuliah yang diampu: Teknologi Perkantoran, Manajemen Kearsipan, Kewirausahaan dan Pancasila. Jabatan fungsional: Asisten Ahli
5. **G. Jarot Windarto**, lahir di Yogyakarta pada tanggal 27 Februari 1965. Tahun 1991 menyelesaikan Pendidikan Sarjana Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Tahun 1996 menyelesaikan Pendidikan Magister Manajemen pada Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Sejak 1992 sampai sekarang menjadi dosen tetap Program Studi Manajemen ASM Marsudirini Santa Maria Yogyakarta. Penulis memiliki pengalaman mengajar untuk mata kuliah Manajemen Pemasaran, Manajemen Operasi, Etika Bisnis dan Pengantar Bisnis. Jabatan Fungsional: Lektor Penata III/c.
6. **Yulius Pribadi**, lahir di Sleman tanggal 5 Juli 1973. Tahun 2002 menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIPOL Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tahun 2012 menyelesaikan pendidikan S2 pada Program Studi Manajemen Komunikasi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Sejak Tahun 2002 sampai sekarang menjadi dosen tetap ASM Marsudirini Santa Maria Yogyakarta. Mata Kuliah yang diampu : Government Relations, Manajemen Kritis, Aplikasi komputer Kehumasan, Desain Grafis, Fotografi, Strategi Komunikasi Pemasaran, Retorika.

7. **FX. Indrojiono**, lahir di Yogyakarta. Latar belakang pendidikan tinggi di Akademi Bahasa Asing Santo Pignatelli Surakarta (1983), Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jurusan Sastra dan Budaya Indonesia (1984). Pada tahun 1997 melanjutkan studi S2 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurusan sastra Inggris, Program studi Pengkajian Amerika. Tahun 1991 sampai sekarang menjadi dosen tetap Program Studi Administrasi Perkantoran ASM Marsudirini Santa Maria Yogyakarta. Mata kuliah yang diampu: Bahasa Indonesia, Spoken Secretarial English. Jabatan Fungsional Lektor.
8. **Ch. Kurnia Dyah Marhaeni**, lahir di Salatiga, 31 Desember 1970. Tahun 1994 menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Komunikasi Massa Fisip Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tahun 2002 menyelesaikan pendidikan S2 Magister Manajemen Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Tahun 1996 sampai sekarang menjadi dosen tetap Program Studi Hubungan Masyarakat ASM Marsudirini Santa Maria Yogyakarta. Mata Kuliah yang diampu: Manajemen Public Relations, Corporate Event Manajemen, Penulisan Naskah Public Relations dan Employee Relations. Jabatan Fungsional: Lektor.
9. **Petrus Sutono**, lahir di Sleman tanggal 16 Juni 1970. Tahun 1996 menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Tahun 1998 menyelesaikan pendidikan S2 pada Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Tahun 2011 Menyelesaikan pendidikan S2 pada Program Studi Pasca Sarjana Magister Teknik Informatika Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Sejak tahun 1998 sampai sekarang menjadi dosen tetap Program Studi Manajemen ASM Marsudirini Santa Maria Yogyakarta. Mata kuliah yang diampu adalah Perpajakan, Sistem Informasi Manajemen, Kewirausahaan, dan Perilaku Konsumen.

PETUNJUK BAGI PENULIS JURNAL ILMU SOSIAL CARITAS PRO SERVIAM

1. Naskah merupakan suatu kajian masalah bidang Ilmu Ekonomi, Sosial dan Humaniora baik hasil penelitian maupun hasil pemikiran yang belum pernah dipublikasikan. Naskah ditulis berdasarkan kaidah penulisan Bahasa Indonesia yang baik dan benar Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Naskah diketik dengan huruf Times News Roman, ukuran 12, spasi ganda, dicetak di atas kertas HVS ukuran kwarto sebanyak 10-30 halaman.
2. Judul tidak lebih 12 kata, ditulis dengan huruf kapital 14, spasi tengah
3. Nama penulis dicantumkan tanpa gelar
4. Abstrak ditulis dalam satu paragraph, maksimum 200 kata, dengan ketikan spasi 1 dan dicetak miring. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris bagi naskah Bahasa Indonesia dan ditulis dalam Bahasa Indonesia bagi naskah Bahasa Inggris. Abstrak disertai kata-kata kunci (*key words*)
5. Sistematika naskah hasil penelitian:
 - a. Judul
 - b. Abstrak
 - c. Pendahuluan
 - d. Metode Penelitian
 - e. Hasil dan Pembahasan
 - f. Kesimpulan dan Saran
 - g. Daftar Pustaka
6. Sistematika naskah hasil Pemikiran:
 - a. Judul
 - b. Abstrak
 - c. Pendahuluan
 - d. Pembahasan
 - e. Penutup atau Kesimpulan
 - f. Daftar Pustaka
7. Ketentuan Penulisan Daftar Pustaka
 - a. Penulis diurutkan berdasarkan alfabetis, nama akhir/ keluarga sebagai urutan pertama atau nama institusi yang bertanggung jawab atas tulisan. Nama penulis diakhiri tanda titik (.)
 - b. Tuliskan tahun terbit karya pustaka dan diakhiri tanda titik (.)
 - c. Tuliskan judul karya pustaka dari seorang penulis lebih dari satu, penulisan diurutkan secara kronologis waktu penerbitan
 - d. Penulisan referensi dari internet terdiri: judul, penulis, alamat website dan keterangan akses/ *down load*
8. Gambar, grafik, dan tabel disajikan dengan diberi nomor urut dan sumber

9. Biodata ditulis dalam bentuk narasi memuat nama lengkap, tanggal dan tempat lahir, keterangan selesai pendidikan S1/S2/S3, pekerjaan, alamat e mail, bidang kerja/ bidang ajar dan karya ilmiah yang pernah ditulis \
10. Naskah yang dikirim dapat:
 - a. Diterima tanpa perbaikan
 - b. Diterima dengan perbaikan dari redaksi
 - c. Diperbaiki oleh penulis dan dipertimbangkan dalam rapat dewan redaksi
 - d. Ditolak karena kurang memenuhi syarat